BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan nasional untuk meminimalisir perkembangan yang terjadi dengan sangat cepat serta tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan-pembangunan ini dilaksanakan di segala lapisan baik di tingkat pusat maupun daerah, hal ini bertujuan meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia dan mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa yang lain, terutama bangsa-bangsa yang sudah maju terlebih dahulu. Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah menerapkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pengertian pembangunan adalah suatu proses yang multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam struktur sosial, setiap masyarakat dan kelembagaan nasional, pengurangan kesenjangan sosial dan pemberantasan kemiskinan absolut. Untuk itu, pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah dicanangkan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan kebutuhan penerimaan dana untuk membiayai pembangunan tersebut. Dana ini diambil dari penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan

tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri, sedangkan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Pajak merupakan sumber untuk meningkatkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa. Tidak ketinggalan, dalam menunjang keberhasilan pembangunan, kemandirian pembangunan sangat diperlukan baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini sangatlah penting karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan-kebijakan tentang keuangan daerah agar pemerintah daerah mampu membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang telah ada.

Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Untuk mencapai itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut (UU Nomor 33, 2004) Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:

- a Hasil pajak daerah.
- b Hasil retribusi daerah.

c Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana perimbangan.

3. Lain-lain pendapatan.

Dalam penelitian ini penelitian lebih memfokuskan untuk membahas mengenai pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013: 23).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditontonkan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah

atau Pemerintah Daerah (Priantara, 2013: 562). Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame dengan Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 15%.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri maupun seluruh pembangkit listrik (Darwin, 2010: 125). Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 6%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perauran perundang-undangan (UU Nomor 33, 2004 Pasal 1 Angka 18). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Komponen paling utama dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD yang perlu dikelola secara maksimal adalah hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah, karena semakin

besar pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin meningkat pula PAD-nya. PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Akan tetapi di beberapa daerah kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah-daerah tersebut masih besar, maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

Adapun gambaran mengenai perkembangan pajak daerah khususnya dari penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 2012-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	371.655.668.413,00	413.178.934.109,00
2013	511.135.469.396,00	606.340.450.986,83
2014	599.833.987.544,00	779.944.837.450,53
2015	824.774.150.700,00	850.286.878.763,61
2016	891.918.479.509,53	881.275.469.153,50
2017	1.259.560.383.097,42	933.017.544.372,20

Sumber : <https://siependa.batam.go.id>

Berdasarkan tabel tersebut terlihat ada kenaikan yang signifikan PAD disetiap tahunnya, ditahun 2012 sebesar Rp 413,178,934,109.00 mengalami peningkatan ditahun 2013 sebesar Rp 606.340.450.986,83 kemudian ditahun 2014 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 779.944.837.450,53 selanjutnya meningkat lagi ditahun 2015 sebesar Rp 850.286.878.763,61 kemudian ditahun 2016 naik menjadi sebesar Rp 881.275.469.153,50 dan ditahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp 933.017.544.372,20

Berbagai penelitian mengenai pajak daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. (Rezlyanti Kobandaha, 2016) penelitian yang berjudul Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Kotamobagu. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak reklame dan pajak hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame sudah efektif dan pajak hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara

keseluruhan kontribusi pajak reklame dan pajak hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Potensi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016.

(Christine Lidya Manongga, 2014) yang berjudul Efektivitas pajak penerangan jalan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Minahasa Utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan menganalisis data realisasi pajak penerangan jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas dari pajak penerangan jalan yang terjadi sangat bervariasi. Secara keseluruhan kontribusi pajak penerangan jalan memberi kontribusi yang baik terhadap PAD.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam peningkatan asli daerah sehingga dapat mendukung kesuksesan pembangunan daerah. Oleh karena ini peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah menguraikan lebih rinci dari setiap permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah. Adapun identifikasi masalah dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Akibat rendahnya penerimaan pajak hiburan dapat menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah di kota Batam.
2. Akibat rendahnya penerimaan pajak reklame dapat menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah di kota Batam.
3. Akibat rendahnya penerimaan pajak penerangan jalan dapat menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah di kota Batam.
4. Akibat rendahnya pencapaian pendapatan asli daerah dapatkan mensukseskan pembangunan daerah di kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Karena keterbatasan pengetahuan penulis, waktu dan biaya untuk melakukan penelitian ini maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada kontribusi penerimaan asli daerah kota Batam. Adapun batasan-batasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup kontribusi penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan kota Batam.
2. Penulis mengambil lokasi penelitian, sumber informasi penelitian dan sumber data pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
3. Penelitian ini dibatasi pada tahun 2012-2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dari itu masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam?
2. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Batam?
3. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam?
4. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.
3. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.

4. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca.

Adapun manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis.
 - a Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan, khususnya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan pada pemerintah Kota Batam.
 - b Bagi akademisi, memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam mengenai pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan khususnya di daerah Kota Batam

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan untuk menerapkan teori yang telah didapatkan di waktu perkuliahan, menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan pendapatan asli daerah kota Batam. Dan Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi (S1) Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam

b Bagi pemerintah, memberikan informasi dan saran kepada pemerintah daerah Kota Batam untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah yang kurang optimal dan upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan atas pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.